



Polemik Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Edmira Rivani^{*)}

Abstrak

Harga minyak dunia terus mengalami lonjakan, pada 24 Februari 2012 harga minyak jenis Brent dan WTI masing-masing sebesar US\$ 126 per barel dan US\$109 per barel. Di samping naiknya harga minyak dunia, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan langkah awal dalam mendukung pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Meskipun pencabutan subsidi BBM secara teori ekonomi memiliki argumentasi yang kuat, hal tersebut menimbulkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap laju inflasi, kemiskinan, serta dampak sosial yang menyimpan potensi besar untuk menyulut kecemburuan sosial. Oleh karena itu, pemerintah juga harus memerhatikan faktor sosial dan politik akibat pencabutan subsidi BBM salah satunya dengan mengendalikan harga kebutuhan pokok di tingkat yang wajar sehingga tidak memberatkan rakyat.

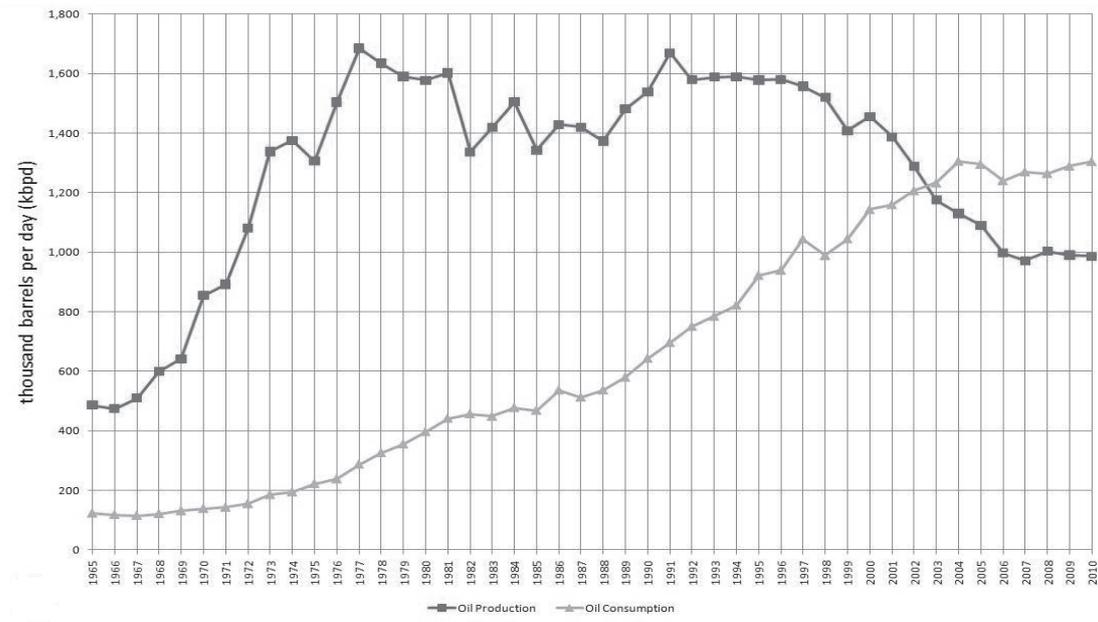
Pendahuluan

Harga minyak masih terus mengalami lonjakan pada Februari 2012 seiring dengan penghentian pengiriman minyak dari Iran ke Inggris dan Prancis, juga rencana penghentian pengiriman minyak ke negara Uni Eropa lainnya seperti Spanyol, Belanda, Yunani, Jerman, Italia dan Portugal. Hal tersebut memberikan kekhawatiran terhadap Eropa mengingat Iran merupakan negara pemasok minyak terbesar ke empat di dunia yaitu mencapai 18% kebutuhan minyak dunia. Akibatnya, harga minyak dunia jenis Brent dan WTI terus mengalami peningkatan. Pada 24 Februari 2012 harga minyak jenis Brent dan WTI masing-masing sebesar US\$ 126 per barel dan US\$109 per barel.

Kenaikan harga minyak memberikan masalah tersendiri bagi negara-negara pengimpor minyak, secara langsung akan meningkatkan biaya produksi barang dan jasa dan beban hidup masyarakat dan pada akhirnya akan memperlemah pertumbuhan ekonomi dunia. Indonesia yang dikenal sebagai salah satu penghasil minyak dunia sekarang merupakan salah satu negara pengimpor minyak. Di samping naiknya harga minyak dunia, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan langkah awal dalam mendukung pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Kenaikan harga BBM selalu menimbulkan pro-kontra dikalangan masyarakat, banyak opini serta pendapat muncul tanpa diikuti oleh data-data yang akurat sehingga pemahaman yang komprehensif mengenai

^{*)} Calon Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: rif_green@yahoo.com

Tingkat Produksi dan Konsumsi Minyak di Indonesia (1965-2010)



Sumber: British Petroleum Statistical Review, 2011

permasalahan BBM dilihat dari sisi produksi, alokasi pemanfaatan BBM, serta dampak kenaikan BBM sangat diperlukan.

Produksi Minyak Indonesia

Indonesia pernah dikenal sebagai negara penghasil minyak, namun pada kenyataannya sekarang kita bukan lagi negara pengekspor minyak.

Tahun 2003, untuk pertama kalinya Indonesia defisit minyak, tingkat konsumsi melampaui tingkat produksi. Tahun 2004, kekurangan ini tidak dapat ditutupi lagi dari cadangan nasional, sehingga untuk pertama kalinya pula Indonesia harus menutupi kekurangan 176 kbpd dengan mengimpor minyak dari luar negeri. Catatan ini terus memburuk. Pada tahun 2010, tercatat produksi minyak Indonesia hanya 986 kbpd padahal tingkat konsumsi melonjak hingga menembus angka 1,304 kbpd atau defisit 318 kbpd.

Tingkat konsumsi diyakini akan semakin meningkat dengan adanya pertumbuhan populasi dan meningkatnya ekonomi. Pemerintah melalui lembaga-lembaga terkaitnya harus kembali meningkatkan produksi minyak atau negara ini akan semakin bergantung kepada minyak impor.

Alasan Kenaikan Harga BBM di Indonesia

Argumen yang dilakukan pemerintah untuk dan kalangan pendukung kenaikan BBM adalah sebagai berikut:

- Harga minyak dunia melebihi angka USD100, asumsi harga minyak di APBN 2011 pada angka USD80 per barel, sehingga dibutuhkan tambahan subsidi sebesar Rp64 triliun.
- Harga domestik yang terlalu rendah mendorong pertumbuhan tingkat konsumsi yang sangat tinggi. Sementara produksi minyak mentah Indonesia terus mengalami penurunan. Selain itu perbedaan harga domestik dan internasional yang cukup tinggi mendorong terjadinya penyelundupan.
- Alasan lain yang menjadi dasar adalah menyangkut masalah keadilan. Subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kelompok 40% kelompok teratas termasuk untuk minyak tanah sekalipun.
- Penyesuaian harga BBM ini memungkinkan pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengalokasikan lebih banyak untuk program penanggulangan

kemiskinan dan pembangunan pedesaan baik yang bersifat investasi jangka panjang (pendidikan dan kesehatan) maupun pengurangan biaya transaksi (infrastruktur pedesaan) dan pengurangan beban keluarga miskin dalam jangka pendek.

Dampak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Kenaikan harga BBM bersubsidi menimbulkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap laju inflasi. Dalam simulasi yang telah dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), memproyeksikan dampak langsung terhadap laju inflasi mencapai 0,93 bila harga BBM bersubsidi naik menjadi Rp6.000 per liter atau naik sebesar Rp1.500. Sedangkan untuk dampak tidak langsungnya bisa sekitar satu sampai dua kalinya dari dampak inflasi yang langsung. Dampak inflasi tidak langsung tersebut berupa kenaikan tarif transportasi umum. Simulasi tersebut berlaku apabila rencana kenaikan BBM bersubsidi diberlakukan bagi seluruh kendaraan (baik kendaraan pribadi maupun niaga). Tapi jika ternyata pemerintah memberlakukan kenaikan harga BBM bersubsidi hanya kepada kendaraan pribadi saja, maka dampak tidak langsungnya (terhadap inflasi) tidak ada.

Dampak lainnya adalah terhadap kemiskinan. Hal tersebut sangat tergantung kenaikan harga BBM terhadap inflasi. Inflasi akan mendorong peningkatan garis kemiskinan. Jika inflasi yang ditimbulkan oleh kenaikan BBM khususnya inflasi bahan makanan tinggi maka dampak kenaikan BBM terhadap kemiskinan juga tinggi.

Tujuan utama kebijakan dana kompensasi BBM berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah sebagai jaring pengaman sosial yang bersifat sementara yaitu mengamankan orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan dan hampir miskin terhadap gejolak perekonomian. Secara teoritis kebijakan *Cash Transfer* lebih baik jika dibandingkan subsidi BBM seperti yang terjadi selama ini dimana sebagian besar BBM dinikmati kelompok non-miskin. Berdasarkan teori *compensating variation* menunjukkan bahwa *Cash Transfer* akan mengembalikan daya beli kelompok

miskin pada kondisi yang semula yaitu kondisi daya beli sebelum adanya kenaikan harga BBM. Namun dana Kompensasi BBM BLT bukanlah program pengentasan kemiskinan yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, tetapi lebih bersifat sementara dan konsumtif. Kebijakan dana kompensasi BBM menimbulkan berbagai problematika sosial tersendiri. Dampak yang sangat besar dari kebijakan ini adalah dampak sosial yang menyimpan potensi besar untuk menyulut kecemburuan sosial. Permasalahan-permasalahan yang muncul antara lain anyak warga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima dana kompensasi, salah sasaran, keributan antar warga, pengrusakan kantor pos dan gedung kelurahan, mati berdesak-desakan saat pengambilan BLT, dll.

Pro dan Kontra Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) mendukung rencana Pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi pada April 2012 mendatang. Hiswana Migas berpandangan ini merupakan langkah awal untuk melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Kenaikan harga BBM bersubsidi yang ideal maksimum Rp1.000 per liter dari saat ini Rp4.500 per liter menjadi Rp5.500 per liter. Dengan menaikkan harga BBM bersubsidi secara teknis penerapannya akan lebih mudah dan tidak membutuhkan pengawasan yang terlalu ketat.

Menurut anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha, kenaikan harga BBM bersubsidi bisa dilakukan, namun harus tetap memperhatikan pengawasan volume agar tepat sasaran. Jika BBM bersubsidi dinaikkan Rp1.000 per liter, maka potensi penghematan APBN sebesar Rp38 triliun. Sementara, bila harganya naik Rp1.500 per liter, potensi penghematannya semakin besar yaitu mencapai Rp54 triliun. Hasil dari penghematan kenaikan harga itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur energi.

Bank Indonesia (BI) juga menyetujui rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, dengan pertimbangan kebijakan penurunan subsidi untuk harga BBM cukup tepat dengan

target moneter negara. Bank Indonesia menilai jika tidak dilakukan kenaikan harga, akan menimbulkan kesulitan dalam APBN dan neraca pembayaran. Kesulitan tersebut adalah timbulnya defisit dalam pos minyak dan gas (migas). Defisit akan memperketat transaksi berjalan di neraca pembayaran. Oleh karenanya, jika tidak segera dilakukan respon maka defisit akan membesar. Dengan kenaikan harga, masyarakat akan menghemat pengeluaran, sehingga akan bermuara pada pengetatan transaksi berjalan di neraca pembayaran.

Di sisi lain, dua fraksi anggota DPR menolak rencana menaikkan BBM bersubsidi. Menurut fraksi PKS, pemerintah seharusnya melakukan efisiensi yang lain, harga minyak internasional akan turun sebab Amerika Serikat tidak akan menyerang Iran dalam jangka waktu yang lama, sementara jika pemerintah melakukan konversi dan pembatasan, pemerintah bisa menekan kuota BBM subsidi. Hal tersebut didukung oleh fraksi PDI-P yang melihat adanya perbedaan besar dalam belanja pemerintah, belanja pemerintah untuk birokrasi mencapai 51% dari total belanja, sementara subsidi pemerintah untuk energi baru hanya 8%.

Penolakan juga dilakukan oleh Ribuan buruh di Depok. Mereka berpandangan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM tersebut bisa memiskinkan kaum buruh. Ini karena kenaikan harga BBM bersubsidi secara langsung akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan tarif transportasi. Sebagai kompensasi, kaum buruh Depok tersebut meminta agar jika Pemerintah tetap menaikkan harga BBM bersubsidi, maka upah buruh juga harus disesuaikan dengan kenaikan harga barang pokok dan tarif transportasi.

Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut cadangan minyak dan produksi minyak dunia terus mengalami penurunan sedangkan konsumsi minyak semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perekonomian sehingga sejak tahun 2004, Indonesia

merupakan *net-importer*. Sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak, pemerintah seharusnya berupaya meningkatkan produksi minyak nasional dengan perbaikan iklim investasi di sektor pertambangan minyak sehingga mampu menggairahkan kegiatan eksplorasi dan eksplitasi minyak bumi.

Walaupun pencabutan subsidi BBM secara teori ekonomi memiliki argumentasi yang kuat, pemerintah juga harus memperhatikan faktor sosial dan politik akibat pencabutan subsidi BBM. Pemerintah seharusnya bersikap dan bertindak tegas terhadap pengusaha yang menggeser kenaikan harga BBM dengan menaikkan harga secara tidak wajar dan tidak didukung data yang kuat, serta mengendalikan harga kebutuhan pokok ditingkat yang wajar sehingga tidak memberatkan rakyat.

Rujukan:

1. *Economic Watch*, 2012, Kementerian Keuangan.
2. BP Statistical Review 2011, 2012, British Petroleum.
3. "BBM, Kebijakan Energi, Subsidi, dan Kemiskinan di Indonesia", 2005, Inovasi Vol.5/XVII/November 2005.
4. Kajian Dampak Kenaikan Harga BBM 2005 Terhadap Kemiskinan, 2005, Working Paper: LPEM FEUI.
5. "Mengkritik Kebijakan Cash Transfer", *Media Indonesia*, 12 September 2005.
6. "BPS: Kenaikan BBM Picu Inflasi 0.93 Persen", <http://wartapedia.com/bisnis/finansial/7513-bps--kenaikan-bbm-picu-inflasi-093-persen.html>, diakses tanggal 6 Maret 2012.
7. "Soal Kenaikan BBM Perlu Dikaji Ulang", <http://www.mitranews.com/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=1999&judul=soal-kenaikan-bbm-perlu-dikaji-ulang.html>, diakses tanggal 7 Maret 2012.
8. "Dua Fraksi Tolak Kenaikan BBM Subsidi", dalam <http://economy.okezone.com/read/2012/03/06/19/588387/dua-fraksi-tolak-kenaikan-bbm-subsidi>, diakses tanggal 12 Maret 2012.